

Drs. H. Widodo Hari Lusinto, B.Sc., S.K.M., M.M., Ph.D.



TEORI DAN APLIKASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN

Manajemen Pelayanan Publik Pada Organisasi

Teori dan Aplikasi
MANAJEMEN PEMERINTAHAN
Manajemen Pelayanan Publik Pada Organisasi

DISUSUN OLEH

Drs. H. Widodo Hari Lusinto, B.Sc., S.K.M., M.M., Ph.D.



PENERBIT KBM INDONESIA

Adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku penulis di tanah air Indonesia. Serta menjadi media sharing proses penerbitan buku.

TEORI DAN APLIKASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN

Manajemen Pelayanan Publik Pada Organisasi

Copyright @2026 By Drs. H. Widodo Hari Lusinto, B.Sc., S.K.M., M.M., Ph.D.

All right reserved

Penulis

Drs. H. Widodo Hari Lusinto, B.Sc., S.K.M., M.M., Ph.D.

Desain Sampul

Aswan Kreatif

Tata Letak

Sofitahm

Editor

Dr. Muhamad Husein Maruapey, Drs., M.Sc.

Background isi buku di ambil dari <https://www.freepik.com/>

Official

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

Penerbit Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia

Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021

081357517526 (Tlpn/WA)

Website

<https://penerbitkbm.com>

www.penerbitbukumurah.com

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Instagram

[@penerbit.kbmindonesia](https://www.instagram.com/penerbit.kbmindonesia)

[@penerbitbukujogja](https://www.instagram.com/penerbitbukujogja)

ISBN: 978-634-278-044-2

Cetakan ke-1, Februari 2026

15,5 x 23 cm, xvi + 338 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit

Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-Kemenkumham
dan isi buku dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin penerbit karena beresiko sengket hukum

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warokhmatulloh wabarokatuh.

Implementasi Pelaksanaan Manajemen Pemerintahan dan Manajemen Pelayanan Publik pada Organisasi yang menerapkan Pembangunan berkelanjutan Berwawasan Lingkungan, dengan memperhatikan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru sangat penting untuk diterapkan sehubungan dengan terjadinya perubahan Iklim Lingkungan Ekstrim yang terjadi di Belahan Dunia ini, termasuk penerapannya pada Organisasi pemerintahan dan perusahaan.

Paradigma *New Public Management* (NPM) atau Manajemen public baru merupakan paradigma yang mengadopsi pendekatan privat sector dalam manajemen usahanya ke proses administrasi pada sector publik. Pendekatan ini menggunakan teori pilihan public (*public Choice*) dalam pengambilan kebijakan dengan didukung profesionalisme manajer.

Pemahaman mengenai Pengertian Manajemen dan Manajemen Pemerintahan dan Manajemen Pelayanan Publik dalam Perspektif Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru pada Organisasi, berdasarkan beberapa teori Manajemen menurut para ahli manajemen disajikan pada dibawah ini, sebagai berikut:

1. Menurut Dwight Waldo, Manajemen ialah tindakan yang ditujukan untuk memperoleh kerjasama yang rasional dalam suatu system administrasi.
2. Menurut G.R. Terry, Manajemen ialah pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan melalui atau bersama –sama orang lain.

3. Menurut Harold Koontz and Cyril O'Donnell, Manajemen adalah pelaksanaan pekerjaan bersama-sama orang lain.

Oleh karena itu, Menurut definisi para ahli Manajemen diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut;

1. Manajemen diperlukan untuk pencapaian tujuan dan pelaksanaan pekerjaan,
2. Manajemen merupakan system kerjasama yang kooperatif dan rasional.
3. Manajemen menerapkan prinsip-prinsip Efisiensi.
4. Manajemen tidak dapat dilepaskan daripada kepemimpinan (Pembimbingan).

Di samping itu juga Konsep, Pengertian dan Penerapan Manajemen Pemerintahan dan Manajemen Pelayanan Publik dalam Perspektif Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru pada Organisasi mengenai Pengertian yang berkaitan Manajemen Pemerintahan, Manajemen Pelayanan Publik, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru, beberapa teori dan pengertian juga dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengertian Administrasi, Menurut Sondang P Siagian, (2013), Administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Unsur-unsur (Bagian-bagian) dari administrasi, adalah sebagai berikut:

- Dua orang manusia atau lebih
 - Tujuan
 - Tugas yang hendak dilaksanakan
 - Sarana dan prasarana tertentu.
2. Pengertian Manajemen, Menurut G.R. Terry, Manajemen ialah pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan melalui atau bersama –sama orang lain.

3. Pengertian Manajemen Pemerintahan, Menurut Sondang P. Siagian, mendefinisikan: Manajemen Pemerintahan adalah manajemen yang diterapkan dalam lingkungan aparatur pemerintahan atau aparatur Negara, tidak saja diartikan sebagai aparatur dari badan eksekutif, tetapi juga aparatur dari badan legislative dan yudikatif, serta baik yang berada pada tingkat pusat maupun yang berada pada tingkat daerah.
4. Pengertian Pelayanan Publik, Pelayanan public adalah suatu bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan public sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, (Kep Men PAN No. 63 tahun 2003).
5. Pengertian Manajemen Pelayanan Publik, Manajemen Pelayanan public merupakan proses penerapan ilmu dan seni untuk Menyusun rencana, mengimplementasikan rencana, mengoordinasikan dan menyelesaikan aktivitas-aktivitas pelayanan demi tercapainya tujuan pelayanan, (Zaenal Mukarom dkk, 2015).
6. Pengertian Ekonomi Hijau, Pada tahun 2011, *United Nation Environmental Program* atau UNEP, mendefinisikan Ekonomi Hijau adalah Sistem dari kegiatan ekonomi yang memperhatikan kemungkinan dampak lingkungan untuk generasi mendatang.
7. Pengertian Ekonomi Biru, Ekonomi Biru adalah pendekatan untuk memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk meningkatkan ekonomi, kesejahteraan Masyarakat dan Kesehatan ekosistem laut
8. Pengertian Manajemen Kesehatan Lingkungan, Manajemen Kesehatan Lingkungan adalah Ilmu dan seni dengan menggunakan Sumber daya manusia (SDM) dan Sumber daya lainnya untuk pencapaian tujuan Program dan Kegiatan Kesehatan lingkungan melalui upaya penyehatan media

lingkungan; pengamanan limbah, sampah, zat kimia berbahaya, pestisida, dan radiasi; pengendalian factor resiko lingkungan, vector dan binatang pembawa penyakit; penyelenggaraan kesehatan lingkungan dalam keadaan tertentu, (Widodo HL, 3 Agustus 2024).

Konsep dan Pemahaman Manajemen Disamping itu juga perlu dijelaskan yang terkait dengan Manajemen dan Kepemimpinan, yaitu Sistem Pemerintahan Khilafah Islam dan Kepemimpinan yang mengayomi, yang merupakan karya nyata tentang Konsep penerapan konsep manajemen yang ditemukan oleh Ahli manajemen Pendidikan yang merupakan putra terbaik bangsa Indonesia, yaitu: Ki Hajar Dewantoro, menginspirasi Penulis untuk menerapkan konsep dan teori manajemen dan kepemimpinan tersebut dalam melaksanakan fungsi organisasi dan menerapkan gaya kepemimpinan dalam mengelola organisasi baik yang ada di pemerintahan maupun pada organisasi social (HAKLI dan INKALINDO) serta di dunia Pendidikan (di Universitas Faletehan, Serang Banten dan saat ini sebagai Direktur Pasca Sarjana Magister Manajemen di STIE IGI Jakarta), juga selama sebagai PNS Penulis pernah menjadi Pemimpin sebagai Kepala Seksi, kasubag, Ka Bagian, Sekretaris Dinas, Irban dan Camat di 3 (Tiga) Pemerintah Daerah (Pemda) selama 38 tahun, yaitu Pemda DKI Jakarta 14 tahun, di Pemda Provinsi Banten selama 9 tahun dan di Pemda Kota Tangerang Selatan (Tangsel) selama 14 tahun, dengan pangkat terakhir sebagai PNS pangkat IV.C. Adapun konsep dan teori manajemen tersebut diatas terurai di bawah ini:

1. Kepemimpinan yang mengayomi

Menurut Sokawati, 1989, dalam Rachmat, (2018, h. 19), Ki Hajar Dewantara menyampaikan pula operasional kepemimpinan yang mempunyai sifat mengayomi, identic dengan prinsip-prinsip dalam seni memerintah, yaitu “Ing ngarso sung tulodo” (pola

panutan), “Ing madyo mangun karso” (Membangkitkan prakarsa), dan “Tut wuri handayani” (Mendorong bawahan). Arti Ing ngarso sung tulodo, menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri teladan bagi orang-orang disekitarnya; Arti Ing madyo mangun karso, seseorang pemimpin di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat; sedangkan arti Tut wuri handayani, bahwa seseorang pemimpin harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang.

2. Sistem Pemerintahan Khilafah Islam

Menurut Imam Al Mawardi (2019),h.345, dalam Ahkam Sulthaniyah, bahwa: Orang pertama yang membuat Diwan (Administrasi) di dalam Islam adalah Khalifah Umar Bin Khattab.

Menurut Rachmat (2019), h. 118, Untuk membangun tata pemerintahan yang baik menurut konsepsi islam adalah sebagai berikut:

- Menegakkan keadilan (equality)
- Partisipasi Masyarakat (participation)
- Tegaknya supremasi hukum (rule of law)
- Transparansi (transparency)
- Efektifitas dan efisiensi (effectiveness and efficiency)
- Akuntabilitas (accountability)
- Visi strategis (strategic vision).

Visi strategis yang dikembangkan dalam kehidupan islam penerapan nilai-nilai akidah yang dibangun, kehidupan selalu dilandasi oleh aspek Ruhiah sehingga terbentuk system penjagaan Ilahiah yang akan mengontrol setiap perilaku kehidupan politik, budaya, ekonomi, hukum, dan sebagainya. Pembangunan Visi ini akan menciptakan sistem pemerintahan yang baik secara total karena terdapat dukungan dari semua pihak tentang arti hidup yang sesungguhnya.

Konsep dan Teori Manajemen dan kepemimpinan: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam dan Kepemimpinan yang mengayomi, menjadi dasar utama Penulis dalam penyusunan buku ini tentang Manajemen Kesehatan Lingkungan.

Pemahaman mendalam tentang Konsep dan Teori Manajemen, Konsep dan Teori Kepemimpinan, Konsep, Teori dan implementasi Manajemen Pemerintahan dan Manajemen Pelayanan Publik dalam Perspektif Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru, sehingga dapat disimpulkan mengenai Pengertian dan Definisi yang terkait dengan Teori dan Aplikasi Manajemen Pemerintahan dan Manajemen Pelayanan Publik dalam Perspektif Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru, sebagai berikut:

- Pengertian Pelayanan Publik,
- Pengertian Ekonomi Hijau,
- Pengertian Ekonomi Biru,
- Pengertian Manajemen pemerintahan,
- Pengertian Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Pelayanan kesehatan lingkungan adalah upaya penyehatan media lingkungan; pengamanan limbah, sampah, zat kimia berbahaya, pestisida, dan radiasi; pengendalian factor resiko lingkungan, vector dan binatang pembawa penyakit; penyelenggaraan kesehatan lingkungan dalam keadaan tertentu serta manajemen kesehatan lingkungan. (Permen PAN & RB No. 71/ 2021).

- Pengertian Manajemen Kesehatan lingkungan
Dibawah ini dijelaskan juga mengenai Pengertian Manajemen Kesehatan Lingkungan, sebagai berikut:

Manajemen Kesehatan lingkungan adalah suatu seni yang melaksanakan dan mengatur system dari bagian Kesehatan Masyarakat untuk menopang keseimbangan ekologis antara manusia dan lingkungannya (Biotik dan abiotik) guna

tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia (Permen PAN & RB No. 71/ 2021)

- Pengertian dan Penerapan Manajemen Risiko berbasis Makan Bergizi Gratis (MBG).

Penulis bersyukur dapat menyelesaikan Buku ke 6 (Enam) ini mengenai Manajemen Pemerintahan dan Manajemen Pelayanan Publik pada Organisasi dalam Perspektif Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru ini, karena berkat Karunia Tuhan Yang Maha Esa dan dukungan dari berbagai pihak, Yaitu:

1. Alhamdulillah berkat karunia dari Allah SWT berupa nikmat Sehat, Selamat, Rizki dan Kesempatan sehingga penulisan buku ini berjalan dengan lancar dan baik,
2. Doa dan dukungan dari Istri saya: Hj. Tin Gustini,SH,MH dan Anak-anak saya Arvisyi: Mohd Arief FW, Widia Mafira Putri Widodo, Syifa Estiningtyas Putri Widodo sehingga penulisan buku ini dapat selesai dan tuntas,
3. Dukungan dari Para sahabat: Ketum dan Jajaran PP HAKLI yang dikomandani oleh Prof. Dr.H. Arif Sumantri,SKM,M.Kes., Pengurus dan Jajaran HAKLI Banten dan Kabupaten/ Kota se Banten, Sahabat dari Universitas faletehan, Serang, Banten dan Sahabat dan rekan Dosen/ Tenaga Pengajar STIE IGI Jakarta, sehingga dapat selesai penulisan buku ini tepat waktu.

Penulisan buku ini belum sempurna sehingga terdapat beberapa kekurangan, Penulis menyadari adanya keterbatasan dari Penulis dalam penulisan buku ini, sekiranya ada masukan dan saran yang diberikan akan penulis terima dengan senang hati, Penulis hanya memiliki semangat dan komitmen selebihnya Adalah dari Tuham Yang Maha Esa sang Pencipta, tentu buku ini masih banyak kekurangan sebab Kesempurnaan hanya Milik Allah SWT atau Tuhan Yang Maha Esa.

Atas perhatian semuanya, Penulis haturkan terima kasih, Mohon maaf lahir bathin, Bravo untuk kita Bersama dan Salam Semangat Pagi, dari Penulis: Widodo Hari Lusinto (WHL).

Tangerang, Banten, Indonesia
Agustus 2025.

Drs. H. Widodo Hari Lusinto, B.Sc., S.K.M., M.M., Ph.D.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	IX
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum dan Kebijakan Implementasi Manajemen Pemerintahan dan Manajemen Pelayanan Publik	5
C. Isu-isu Strategis Penerapan Pelaksanaan Pemerintahan	8
D. Konsep, Pengertian, Informasi dan Implementasi Pembangunan berkelanjutan Berwawasan Lingkungan	14
BAB 2 KONSEP, PENGERTIAN DAN PENERAPAN ADMINISTRASI DALAM MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAN MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK	21
A. Pengertian Administrasi & Administrasi Publik dan Unsur Administrasi	21
B. Jenis dan Fungsi Administrasi	25
C. Konsep dan Pengertian Administrasi Lingkungan	28
BAB 3 KONSEP, PENGERTIAN DAN IMPLEMENTASI MANAJEMEN PADA MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAN MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK	35
A. Pengertian Manajemen yang Mendasari Manajemen Pemerintahan dan Manajemen Pelayanan Publik	35

B. Pengertian Manajemen Resiko dan Penerapan Teori Manajemen-----	50
C. Konsep dan Pengertian Lingkungan Hidup dan Manajemen Lingkungan-----	55
D. Pengertian Manajemen Kesehatan Lingkungan, Ruang Lingkup dan Fungsi Manajemen -----	58
BAB 4 KONSEP, PENGERTIAN DAN IMPLEMENTASI KEPEMIMPINAN, ORGANISASI, EKONOMI HIJAU DAN EKONOMI BIRU PADA MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAN MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK -----	63
A. Konsep dan Pengertian Kepemimpinan -----	63
B. Konsep dan pengertian Organisasi -----	67
C. Konsep dan Pengertian Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru -----	72
BAB 5 KONSEP, PENGERTIAN DAN IMPLEMENTASI MANAJEMEN SUMBER DAYA PADA MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAN MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK-----	77
A. Konsep dan Pengertian Manajemen -----	77
B. Konsep dan Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) -----	79
C. Konsep dan Pengertian Pengembangan SDM-----	81
D. Konsep, Pengertian dan Implementasi Sumber Daya dan Manajemen Sumber Daya -----	83
BAB 6 KONSEP, PENGERTIAN DAN IMPLEMENTASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN-----	89
A. Konsep dan Pengertian Manajemen Pemerintahan sebagai Seni -----	89
B. Konsep dan Pengertian Manajemen Pemerintahan -----	96

C. Konsep dan Pengertian Pemerintah, Pemerintahan, Sistem Pemerintahan dan Pemerintahan daerah -----	98
D. Pengertian dan Implementasi Manajemen Pemerintahan dan Urusan pemerintahan -----	104
E. Konsep dan Penerapan Manajemen Pemerintahan ----	107

BAB 7 KONSEP, PENGERTIAN DAN IMPLEMENTASI MANAJEMEN PEMERINTAH DAERAH, STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN INOVASI DAERAH DALAM MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAN MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK -----115

A. Pengertian dan Implementasi Manajemen Pemerintahan daerah-----	115
B. Pengertian dan Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)-----	128
C. Pengertian dan Implementasi Inovasi Daerah-----	134
D. Konsep, Pengertian dan Implementasi Program dan Kegiatan Pemerintahan di Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam rangka penerapan Inovasi daerah-----	138

BAB 8 KONSEP, PENGERTIAN DAN IMPLEMENTASI URUSAN PEMERINTAHAN PADA MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAN MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK -----145

A. Konsep dan Pengertian Pemerintah, Pemerintahan dan Pemerintah daerah yang mendasari Implementasi Urusan pemerintahan-----	145
B. Konsep Pengertian dan Jenis Urusan Pemerintahan----	149
C. Dasar Hukum dan Kebijakan dalam Implementasi Urusan pemerintahan -----	150
D. Pembagian Urusan pemerintahan dan Pelaksanaan & capaian Urusan Pemerintahan -----	152

**BAB 9 KONSEP, PENGERTIAN DAN IMPLEMENTASI
MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK DAN PELAYANAN
PRIMA PADA MANAJEMEN PEMERINTAHAN -----159**

- A. Konsep dan Pengertian Manajemen dan Pelayanan
Publik -----159
- B. Konsep dan Pengertian Pelayanan Publik-----162
- C. Konsep, Pengertian dan Implementasi Manajemen
Pelayanan Publik-----165
- D. Konsep dan Pengertian Pelayanan Prima, Strategi
Pengembangan Pelayanan Prima Dan Implementasi
Program Pelayanan Prima -----167
- E. Pengertian dan Penerapan Manajemen Pelayanan:
Manajemen Berkualitas (*Total Quality Management (TQM)*)
dan *International Standard Organization (ISO)*, Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Survei Kepuasan
Masyarakat (SKM) -----170

**BAB 10 KONSEP, PENGERTIAN DAN PENERAPAN FUNGSI
MANAJEMEN TENTANG PENGAWASAN/ PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK PADA PEMERINTAH
DAERAH-----175**

- A. Konsep dan Pengertian Pelayanan Publik, Manajemen
Pelayanan Publik, Manajemen Pemerintahan, Urusan
Pemerintahan Wajib dan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik -----175
- B. Konsep, Pengertian dan Penerapan Pelayanan Publik
melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah
Daerah -----183
- C. Konsep, Pengertian dan Penerapan Pelayanan Publik,
Pelayanan Prima dan Kepuasan Masyarakat pada
Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan -----190

D. Konsep dan Penerapan Pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pelaksanaan Pelayanan Publik di Pemerintah Daerah.-----	195
E. Konsep dan Penerapan Pelaksanaan Survei Pelayanan Publik melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)/ Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Instansi Kecamatan pada pemerintah -----	198
F. Konsep, Pengertian dan Penerapan Pelaksanaan Evaluasi Kepatuhan pelayanan public yang dilakukan oleh Lembaga Ombudsman RI dan Kementerian PAN dan RB pada Pemerintah daerah-----	202

BAB 11 KONSEP, PENGERTIAN DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BERBASIS PROGRAM NASIONAL MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) -----207

A. Pengertian dan Penerapan Manajemen Risiko pada Program Makan Bergizi Gratis-----	207
B. Pengertian dan Penerapan Kebijakan dan Dasar Hukum Program Nasional Makan Bergizi Gratis -----	211
C. Konsep dan Penerapan Visi dan Misi Pemerintah Sesuai RPJMN dan Asta Cita dalam Pelaksanaan Program MBG -----	216
D. Konsep dan Penerapan Manajemen, Program dan Kegiatan, Kelembagaan dan SDM pada Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) -----	224
E. Konsep, Pengertian dan Penerapan Pencegahan Dampak Pelaksanaan Program dan Kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG) Aman dan Sehat-----	228

BAB 12 KONSEP, PENGERTIAN DAN IMPLEMENTASI PENDEKATAN SISTEM DALAM MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAN MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK	267
A. Pengertian Paradigma dan Prinsip Berpikir Sistem	267
B. Konsep Sistem-sistem Manajemen	269
C. Konsep dan Pengertian Perubahan Sistem dalam Kepemimpinan	272
D. Konsep dan Pengertian Hukum Perilaku Sistem	273
E. Konsep dan Pengertian Intervensi Sistem	275
BAB 13 KONSEP DAN PENERAPAN TUGAS DAN FUNGSI URUSAN PEMERINTAHAN DAN PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK PADA PEMERINTAHAN DAERAH	277
A. Pengertian dan Penerapan Pemerintahan, Pemerintahan Daerah, dan Urusan Pemerintahan	277
B. Penerapan Pengalaman Bekerja dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi pada Pemerintah Daerah DKI Jakarta	285
C. Penerapan Pengalaman Bekerja dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten	287
D. Penerapan Pengalaman Bekerja dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi pada Pemda Kota Tangerang Selatan	292
BAB 14 KONSEP, PENGERTIAN DAN IMPLEMENTASI MEWIRAUSAHAKAN BIROKRASI (<i>REINVENTING GOVERNMENT</i>), MEMANGKAS BIROKRASI DAN PEMERINTAHAN BERORIENTASI PELANGGAN	303
A. Konsep, Pengertian dan Implementasi Mewirausahakan Birokrasi dan Memangkas Birokrasi	303

B. Konsep dan Pengertian Memangkas Birokrasi dan Tipologi organisasi pemerintahan-----	306
C. Konsep dan Pengertian Pelayanan Prima, Kebijakan Publik, Standar Pelayanan Prima (SPM) dan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik-----	311
BAB 15 KONSEP, PENGERTIAN DAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN, DAN KONSEP <i>MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDG,S) & SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG,S)</i> PADA MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAN MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK-----	317
A. Pengertian dan Implementasi Pembangunan Berkelanjutan-----	317
B. Pengertian dan Implementasi Pembangunan Berwawasan Lingkungan-----	319
C. Pengertian dan Implementasi Konsep MDG,s - SDG,s-----	324
DAFTAR PUSTAKA -----	331
BIODATA PENULIS DAN PENYUSUN BUKU-----	335

DAFTAR PUSTAKA

Bentuk Buku:

- (1). Hasibuan, Malayu. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta,. Bumi Aksara.
- (2). Sukarna. 2011. *Dasar-dasar Manajemen*. Mandor Maju,. Bandung.
- (3). Dwiyanto, Agus Dkk. 2017. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Jogjakarta,. Gadjah Madah University Press.
- (4). Dwiyanto, Agus. 2014. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Jogjakarta,. Gadjah Mada University Press.
- (5). Hari L, Widodo, Des 2024. *Teori dan Implementasi Administarsi Lingkungan*. Depok, Sleman Jogjakarta, Penerbit KBM Indonesia.
- (6). Hari L, Widodo, Jan 2025. *Manajemen Kesehatan Lingkungan di Era Modern*. Depok, Sleman Jogjakarta, Penerbit KBM Indonesia.
- (7). Hari L, Widodo, April 2025. *Teori dan Implementasi Kepemimpinan pada Organisasi*. Depok, Sleman Jogjakarta, KBM Indonesia.
- (8). Purnamasari, Irma D, Suswunarno, 2011. *Kiat-kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah: Akad Syariah*, Bandung, Penerbit Kaifa, PT Mizan Pustaka.
- (9). Osborne, David,. Ted Gaebler. 1997. *Mewirauahakan Birokrasi (Reinventing Government): Mentranformasi Semangat Wirauaha ke Dalam Sektor Publik*. Jakarta,. PT Pustaka Binaman Presindo.

- (10). Osborne, David,. Peter Plastrik. 2000. *Memangkas Birokrasi: Lima Strategi menuju Pemerintahan Wirausaha*. Jakarta,. Penerbit PPM.
- (11). Rachmat,. 2018. *Dasar-dasar Manajemen Pemerintaahan*. Bandung. Pustaka Setia Bandung.
- (12). Semil, Nurmah. 2018. *Pelayanan Prima Instansi Pemerintah: Kajian kritis pada sistem pelayanan public di Indonesia*. Depok,. Prenada Media Group.
- (13). Utomo, Warsito. 2012. *Administrasi Publik baru Indonesia: Perubahan paradigm dari Adminstrasi Negara ke Administrasi Publik*. Jogjakarta. Kerjasama Program Magister Adminnistrasi Publik UGM dengan Pustaka pelajar.
- (14). Sumirat, Juli, 1994. *Kesehatan lingkungan*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press
- (15). Sumantri, Arif, 2010. *Kesehatan Lingkungan dan Perfektif Islam*. Jakarta.
- (16). Hari L, Widodo, 2025. *Manajemen Risiko berbasis Pencemaran Lingkungan*. Depok, Sleman Jogjakarta, KBM Indonesia.
- (17). Hari L, Widodo, 2025. *Manajemen, Ekonomi dan Perbankan Syariah (Teori dan Aplikasi)*. Depok, Sleman Jogjakarta, KBM Indonesia.
- (18). MS Paojan, 2024. *Akuntansi Perusahaan Jasa (Teori dan Praktek)*. Depok, Sleman, Jogjakarta, KBM Indonesia.
- (19). Dailibas, Nasution D, Suwanda D, 2020. *Panduan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka menengah daerah (RPJMD)*. CV. Absolute Media, Karawang.
- (20). Fahmi, Fahmi, 2021. *Manajemen Kepemimpinan, Teori & Aplikasi*. Alfabeta,CV, Bandung.
- (21). Rachmat, 2018. *Dasar-Dasar Manajemen Pemerintahan*. Pustaka Setia, Bandung.
- (22). Boediono, 1999. *Pelayanan Prima. Kawula Indonesia*, Jakarta.

Dokumen:

- (23). Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang *Pelayanan Publik*
- (24). Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2008 tentang *Pembentukan Kota tangerang selatan di Provinsi banten*
- (25). Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan daerah*
- (26). Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2008 tentang *Ombudsman Republik Indonesia (ORI)*
- (27). Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang *Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik*
- (28). Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang *Organisasi Perangkat daerah*
- (29). Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang *Standar Pelayanan Minimal (SPM)*
- (31). Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang *Kecamatan*
- (32). Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014 tentang *Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).*
- (33). Peraturan Menteri PAN & RB No 23 tahun 2017 *Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik*
- (34). Peraturan daerah Kota Tangerang selatan No. 8 tahun 2016 tentang *Perangkat daerah*
- (35). Peraturan daerah Kota Tangerang selatan No. 5 tahun 2016 tentang *Urusan Pemerintahan*
- (36). Peraturan daerah Kota Tangerang selatan No. 17 tahun 2019 tentang *Penyelenggaraan Pelayanan Publik*
- (37). Perwal Kota Tangerang selatan No. 33 tahun 2016 tentang *Pedoman Penyusunan penetapan dan penerapan Standard pelayanan pada penyelenggaraan pelayanan public.*
- (38). Perwal Kota Tangerang Selatan No. 72 tahun 2020 tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli.*

- (39). Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) No. 23 tahun 2014 tentang *Pemerintahan daerah*
- (40). Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) No. 17 tahun 2023 tentang *Kesehatan*
- (41). Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, (42). UU RI No 51 tahun 2008 tentang *Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten*
- (43). UU RI No 25 tahun 2009 tentang *Pelayanan Publik*
- (44). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) No. 17 tahun 2018 tentang *Kecamatan*
- (45). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) No. 86 tahun 2018 tentang *Keamanan Pangan*
- (46). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) No. 28 tahun 2024 tentang *Peraturan pelaksanaan (UU RI) No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan*
- (47). Menurut Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor. 83 tahun 2024 tentang *Pembentukan Badan Gizi Nasional*
- (48). Peraturan Kepala BGN RI No. 244 tahun 2025 tentang *Petunjuk Teknis Bantuan pemerintah penyelenggaraan MBG tahun 2025*
- (49). Surat Edaran Dirjen P2P Kemenkes Nomor. HK.02/C.I/4202/2025 tentang *Percepatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG)*
- (50). Peraturan BGN RI No. 1 tahun 2025 tentang *Tata cara Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan BGN*

BIODATA PENULIS DAN PENYUSUN BUKU

1. **Nama:** H. Widodo Hari Lusinto (ATPA.,NETP.,B.Sc., SKM., Drs.,MM.,Ph.D)
2. **Riwayat Pendidikan:**
 - a. Sarjana Muda: Akademi Penilik Kesehatan Teknologi Sanitasi (APKTS), Jakarta – Konsentrasi: Kesehatan Lingkungan: B.Sc (Tahun 1986)
 - b. Sarjana: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta (STIA LAN) - Konsentrasi: Manajemen Pemerintahan Daerah (Tahun 1997)
 - c. Sarjana: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) - Konsentrasi: Epidemiologi Kesehatan lingkungan (Epid Kesling): SKM (Tahun 1998)
 - d. Pasca Sarjana/ Magister Manajemen: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen (STIM) Jakarta-Magister Manajemen (MM) – (Tahun 2000)
 - e. Pasca Sarjana/ Doktoral: Asia University [AeU], Kuala Lumpur - Malaysia, Ph.D-Bussines Administration (BA)- (2022)
3. **Riwayat Pekerjaan:**
 - a. Pemda DKI Jakarta: Sudinkes Jakarta Pusat, Dinkes DKI Jakarta-Wasor DBD/ Staf pelaksana (1987-2001);
 - b. Pemda Provinsi Banten: Kasubid Teknis Amdal-Bapedalda Provinsi Banten (2001-2005), Kasie Was-Bawasda Provinsi Banten (2006-2007), Kasie Surveilans Imunisasi Dinkes

Provinsi Banten (2007-2008), Kasubag Kesehatan-Biro Kesra Setda Provinsi Banten (2008-2009)

- c. Pemda Kota Tangerang Selatan: Inspektur Pembantu (Irban) KKUD (2009-2010), Irban Wil III (2010-2012), Sekretaris Inspektorat (2012-2014), Kabag Pembangunan/Kepala ULP (2015-2016), Kabag Pemerintahan (2017-2021), Camat Pondok aren (2017-2018), Camat Ciputat Timur (2018-2019), Camat Pamulang (2020), Sekretaris Dispora (2022);
 - d. STIKES dan Universitas Faletehan (UF): Dosen Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Manajemen Kesehatan (2002-2023).
 - e. STIE IGI Jakarta: Direktur Pasca Sarjana Magister Manajemen (S2 MM) dan Dosen Manajemen pada Prodi S1 Manajemen dan S2 Magister Manajemen
 - f. Universitas Ichsan Satya (UIS) Tangerang Selatan: Dosen Manajemen pada Prodi S1 Manajemen Ritel dan Prodi S1 Perpajakan, Fakultas Ekonomi UIS
4. **Piagam Penghargaan, Kompetensi dan Pengalaman Diklat:**
- a. **Piagam Penghargaan**
 - 1) **Piagam Penghargaan Satya Lencana 20 (Dua Puluh) tahun** Pengabdian tanpa Cacat dan Terus menerus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) **diterbitkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono, Medali Perak**, diterbitkan oleh Presiden Republik Indonesia
 - 2) **Piagam Penghargaan Satya Lencana 30 (Tiga puluh) tahun** Pengabdian tanpa Cacat dan Terus menerus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) **diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo, Medali Emas**, diterbitkan oleh Presiden Republik Indonesia
 - b. **Kompetensi**
 - 1) Anggota Tim Penyusun Amdal (ATPA), Sertifikat Kompetensi BNSP

- 2) Asessor Bidang Lingkungan Hidup, Sertifikat Kompetensi BNSP
- 3) Anggota Tim Penilai Amdal/ Tim Uji Kompetensi, Komisi Amdal/ TUK: Provinsi Banten, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang.

c. Aktif pada Organisasi Profesi:

- 1) Ketua Forum Tenaga sanitasi Lingkungan (TSL) Puskesmas Indonesia, Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) Pusat
- 2) Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) Provinsi Banten
- 3) Anggota Dewan Pakar: Ikatan Pengkaji Lingkungan Hidup Indonesia (INKALINDO), DPW Provinsi Banten

d. Pengalaman Diklat:

- 1) Bidang Kesehatan Masyarakat: NETP-WHO (1990), Surveilans Epid, Wasor DBD, Wasor Imunisasi, HIV/ Aids, Flu Burung, Covid 19, Seminar Nasional HAKLI dari Sarasehan ke 1 sd 27 (1 Oktober 2022)
- 2) Bidang Lingkungan Hidup: Amdal A: 1). Dasar-dasar Amdal-IPB, 2). Amdal B (Penyusun Amdal)-UI, 3). Amdal B-IPB, 4). Amdal C (Penilai)-IPB, 5). Auditor LH-IPB, 6). Pengawasan Lingkungan (IPB), 7). Limbah Industri-YKC-Jepang,2007; 8). Anggota Penyusun Amdal (ATPA)-Sertifikt BNSP; 9). Asesor Bidang LH-Inkalindo.
- 3) Bidang Administrasi/ Manajemen: 1). PEKERTI-Unpas (September 2022), 2). Dasar-dasar Kewidyaiswaraan di Pemda DKI Jakarta dan Banten (2 kali), 3). Dasar Auditing-BPKP, 4). SPIP-BPKP, 5). Manajemen Audit-STAN, 6). Diklat Pimpinan APIP-BPKP, 7). Audit Investigasi-BPK RI, 8). Audit Bidang Perhubungan-BPKP, 9). Audit Bidang Ke-PU-an-BPKP, 10). Audit Keuangan-Setneg, 11). Penilai Angka Kredit bagi

P2UPD-Bandiklat Kemendagri, 12). Manajemen Seminar-Bandiklat Provinsi Banten

e. Pengalaman Menyusun Buku ber - ISBN, terdapat 6 (Enam) buku yang sudah disusun dan diterbitkan, Adalah sebagai berikut:

- 1) Hari L, Widodo, Des 2024. Teori dan Implementasi Administarsi Lingkungan. Depok, Sleman Jogjakarta, Penerbit KBM Indonesia.
- 2) Hari L, Widodo, Jan 2025. Manajemen Kesehatan Lingkungan di Era Modern. Depok, Sleman Jogjakarta, Penerbit KBM Indonesia.
- 3) Hari L, Widodo, April 2025. Teori dan Implementasi Kepemimpinan pada Organisasi. Depok, Sleman Jogjakarta, KBM Indonesia.
- 4) Hari L, Widodo, 2025. Manajemen Risiko berbasis Pencemaran Lingkungan. Depok, Sleman Jogjakarta, KBM Indonesia.
- 5) Hari L, Widodo, 2025. Manajemen, Ekonomi dan Perbankan Syariah (Teori dan Aplikasi). Depok, Sleman Jogjakarta, KBM Indonesia.
- 6) Hari L, Widodo, 2025. Manajemen Pemerintahan dan Manajemen Pelayanan Publik pada Organisasi (Teori dan Aplikasi). Depok, Sleman Jogjakarta, KBM Indonesia.

f. Aktif di Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan Seni Budaya:

- 1) Anggota Dewan Mesjid Indonesia (DMI) Provinsi Banten
- 2) Ketua Koordinator Wlayah (Korwil) Paguyuban Reog Ponorogo, Cabang Kota Tangerang Selatan.